

PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI KELURAHAN DULOMO SELATAN KECAMATAN KOTA UTARA, KOTA GORONTALO

Mardun Sadue¹, Tety Thalib², Muhammad Yusran Bahri³, Ronansi Lihawa⁴,
Risna Y. Daud⁵, Andi Yusuf Katili⁶

¹⁻⁶Universitas Bina Taruna Gorontalo

mardun79@gmail.com, tetythalib72@gmail.com, muhyusranbahri@gmail.com,
ona.lihawa@gmail.com, royke3110@gmail.com, yusuf2801@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, mengenai pendidikan politik dan pengawasan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Rendahnya tingkat literasi politik di tingkat kelurahan menjadi permasalahan utama yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan ini. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif, dan tanya jawab yang dilaksanakan pada Kamis, 18 Mei 2026, di Aula Kantor Kelurahan Dulomo Selatan, dengan melibatkan 25 peserta dari unsur masyarakat dan aparatur kelurahan serta 15 mahasiswa pendamping. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan dengan nilai rata-rata keseluruhan 4,45 dari skala 5,00, yang mencerminkan keberhasilan program dalam meningkatkan kapasitas demokratis masyarakat. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan nilai-nilai good governance, pemberdayaan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi di tingkat kelurahan. Implikasi jangka panjang dari program ini diharapkan mampu menekan praktik money politics dan meningkatkan kualitas pengawasan pemilu berbasis komunitas.

Kata kunci: Pendidikan Politik, Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Umum, Good Governance, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

This Community Service (PkM) activity aims to enhance the understanding of the community and apparatus of Dulomo Selatan Urban Village, North City District, Gorontalo City, regarding political education and community participation oversight in the General Election (Pemilu). The low level of political literacy at the urban village level is the primary problem underlying this activity. The methods employed included socialization, counseling, interactive discussions, and question-and-answer sessions conducted on Thursday, May 18, 2026, at the Dulomo Selatan Urban Village Office Hall, involving 25 participants from community and village apparatus representatives, along with 15 accompanying postgraduate students. Evaluation results demonstrated a significant improvement in participant understanding, with an overall average score of 4.45 out of 5.00, reflecting the program's success in enhancing democratic capacity. This activity contributes to strengthening good governance values, community empowerment, and promotes active citizen participation in the democratic process at the urban village level. The long-term implications of this program are expected to reduce money politics practices and improve the quality of community-based election oversight.

Keywords: Political Education; Community Participation; General Election; Good Governance; Community Empowerment

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan menuntut partisipasi aktif seluruh warga negara dalam setiap aspek kehidupan politik, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan instrumen fundamental dalam perwujudan kedaulatan rakyat dan mekanisme paling konkret untuk mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi (Norris, 2023). Namun demikian, partisipasi politik yang bermakna tidak akan terwujud tanpa adanya fondasi pendidikan politik yang memadai di tingkat akar rumput. Fenomena rendahnya literasi politik masyarakat menjadi salah satu tantangan terbesar dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, terutama di tingkat pemerintahan terkecil seperti kelurahan (Aspinall & Berenschot, 2019).

Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, merupakan salah satu unit pemerintahan terbawah yang menghadapi permasalahan kompleks terkait rendahnya kesadaran politik warganya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pra-kegiatan yang dilakukan oleh tim mahasiswa Pascasarjana Universitas Bina Taruna Gorontalo, teridentifikasi beberapa permasalahan mendasar: (1) sebagian besar masyarakat belum memahami secara komprehensif mekanisme dan tahapan penyelenggaraan pemilu; (2) minimnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban pemilih; (3) rendahnya kesadaran mengenai bahaya praktik politik uang (money politics) yang merusak integritas pemilu; serta (4) lemahnya kapasitas pengawasan partisipatif masyarakat terhadap proses pemilu.

Permasalahan-permasalahan tersebut bermuara pada realitas bahwa mekanisme pengawasan pemilu berbasis komunitas (community-based election monitoring) belum berjalan secara optimal. Padahal, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan good governance di tingkat lokal (Beetham, 2022). Penelitian Mietzner (2020) menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan tingkat literasi politik rendah cenderung memiliki tingkat pelanggaran pemilu yang lebih tinggi, termasuk praktik patronase dan politik uang.

Secara teoretis, partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak sekadar hadir untuk mencoblos, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas, yakni keterlibatan dalam pengawasan proses, pelaporan pelanggaran, serta edukasi sesama warga (Arnstein, 1969; Cornwall, 2008). Teori pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Freire (1970) menegaskan bahwa transformasi sosial dimulai dari kesadaran kritis (conscientization) yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan dialog. Dalam konteks administrasi publik, pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai strategi kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis (Gaventa, 2021).

Berangkat dari latar belakang tersebut, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Bina Taruna Gorontalo melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berfokus pada penguatan pendidikan politik dan pengawasan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Tujuan spesifik kegiatan ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur kelurahan tentang pendidikan politik dan mekanisme pemilu; (2) menumbuhkan kesadaran akan pentingnya

pengawasan pemilu berbasis masyarakat; (3) mendorong partisipasi aktif warga dalam mencegah praktik money politics; dan (4) memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan kelurahan dalam memfasilitasi pendidikan politik bagi warganya.

METODE PELAKSANAAN

Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan PkM dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Mei 2026, mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan selesai, bertempat di Aula Kantor Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas peserta serta keterjangkauan wilayah sasaran oleh tim pelaksana.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

Peserta Kegiatan

Kegiatan ini dihadiri oleh 25 orang peserta yang terdiri dari masyarakat umum dan aparatur/pengurus Kelurahan Dulomo Selatan. Peserta merepresentasikan berbagai lapisan masyarakat, meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, PKK, serta staf kelurahan. Kegiatan didampingi oleh 15 mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Bina Taruna Gorontalo selaku fasilitator dan pendamping kegiatan.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PkM ini dilaksanakan melalui tiga tahapan sistematis sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Tahap Persiapan: Tim mahasiswa melakukan koordinasi awal dengan pihak kelurahan, asesmen kebutuhan melalui wawancara informal dengan tokoh masyarakat dan aparat kelurahan, serta penyusunan materi penyuluhan yang komprehensif. Tahap ini juga mencakup penyiapan instrumen evaluasi pre-test dan post-test sederhana untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.

Tahap Pelaksanaan: Kegiatan dilakukan secara terstruktur dengan metode partisipatif yang melibatkan seluruh peserta secara aktif. Setiap sesi dirancang untuk mendorong keterlibatan maksimal peserta dalam proses pembelajaran politik.

Tahap Evaluasi dan Pelaporan: Tim melakukan evaluasi formatif selama kegiatan berlangsung serta evaluasi sumatif melalui pengisian kuesioner oleh peserta di akhir kegiatan, guna mengukur efektivitas program.

Metode Penyampaian Materi

Kegiatan ini menggunakan pendekatan andragogi (pendidikan orang dewasa) yang mengintegrasikan empat metode utama: (1) Sosialisasi, mencakup pemaparan materi tentang sistem pemilu, regulasi pemilihan, dan peran Bawaslu serta masyarakat dalam pengawasan; (2) Penyuluhan, berupa pemberian informasi terstruktur mengenai hak dan kewajiban pemilih, mekanisme pelaporan pelanggaran, serta ancaman hukum money politics; (3) Diskusi Interaktif, melalui fasilitasi pertukaran pendapat dan pengalaman antar peserta menggunakan metode focus group discussion; dan (4) Tanya Jawab, sebagai ruang klarifikasi dan pendalaman materi secara langsung. Penggunaan multimedia berupa slide presentasi, video edukasi pendek, dan lembar kerja peserta turut membantu memvisualisasikan materi secara lebih menarik dan mudah dipahami (Subianto, 2022).



Gambar 3. Pemaparan Materi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PkM berjalan secara lancar dan kondusif. Acara dibuka secara resmi oleh Lurah Dulomo Selatan yang memberikan sambutan positif dan mengapresiasi inisiatif mahasiswa Pascasarjana Universitas Bina Taruna Gorontalo dalam mendukung peningkatan kapasitas demokratis masyarakat kelurahan. Sesi pembukaan diikuti dengan pemaparan materi pertama tentang "Sistem Pemilu Indonesia dan Peran Serta Masyarakat" yang disampaikan oleh Mardun Sadue, dilanjutkan oleh Muhammad Yusran Bahri dengan materi "Mekanisme Pengawasan Pemilu Berbasis Komunitas". Sesi berikutnya, Ronansi Lihawa memaparkan materi "Bahaya Money Politics dan Upaya Pencegahannya", yang kemudian dilanjutkan oleh Risna Y. Daud dengan materi "Pemberdayaan Masyarakat dalam Tata Kelola Pemilu yang Demokratis".

Tingkat Partisipasi Peserta

Tingkat kehadiran peserta mencapai 100% dari undangan yang diedarkan, menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat dan aparatur Kelurahan Dulomo Selatan. Dari 25 peserta, seluruhnya mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir sesi. Partisipasi aktif ditunjukkan oleh tingginya volume interaksi dalam sesi diskusi dan tanya jawab, dengan rata-rata setiap peserta mengajukan minimal satu pertanyaan atau memberikan satu tanggapan. Hal ini sejalan dengan temuan Putnam (2000) bahwa modal sosial yang tinggi dalam suatu komunitas berbanding lurus dengan tingkat partisipasi publik yang lebih aktif.

Hasil Diskusi dan Temuan Lapangan

Dari sesi diskusi interaktif, teridentifikasi beberapa temuan lapangan yang signifikan. Pertama, sebagian besar peserta mengakui belum pernah mendapatkan edukasi formal mengenai mekanisme pengawasan pemilu sebelumnya. Kedua, terdapat kebingungan di antara peserta mengenai batas antara pemberian yang diperbolehkan dengan praktik money politics yang terlarang secara hukum. Ketiga, banyak peserta yang tidak mengetahui prosedur pelaporan pelanggaran pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kelurahan. Keempat, ditemukan adanya persepsi fatalistik (pasrah) di kalangan sebagian peserta bahwa praktik money politics merupakan hal yang "sudah biasa" dalam setiap pemilu. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian Aspinall dan Berenschot (2019) tentang demokrasi dan klienelisme di Indonesia.

Peningkatan Pemahaman Peserta

Evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert 1–5 menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh aspek yang diukur. Tabel 1 berikut menyajikan rekapitulasi hasil evaluasi peserta setelah mengikuti kegiatan PkM.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta Kegiatan PkM

No	Aspek Evaluasi	SS (5)	S (4)	RR (3)	TS (2)	Rerata
1	Pemahaman tentang hak dan kewajiban pemilih	14 (56%)	9 (36%)	2 (8%)	0 (0%)	4,48

2	Pengetahuan mekanisme pemilu dan tahapan penyelenggaraan	12 (48%)	11 (44%)	2 (8%)	0 (0%)	4,40
3	Kemampuan mengenali praktik kecurangan pemilu (money politics)	10 (40%)	13 (52%)	2 (8%)	0 (0%)	4,32
4	Pemahaman peran pengawasan masyarakat dalam pemilu	13 (52%)	10 (40%)	2 (8%)	0 (0%)	4,44
5	Motivasi berpartisipasi aktif dalam pemilu mendatang	16 (64%)	8 (32%)	1 (4%)	0 (0%)	4,60
	Rata-Rata Keseluruhan					4,45

Keterangan: SS = Sangat Setuju; S = Setuju; RR = Ragu-ragu; TS = Tidak Setuju

Berdasarkan Tabel 1, nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,45 dari skala 5,00 mencerminkan tingkat pemahaman yang sangat baik. Aspek "Motivasi berpartisipasi aktif dalam pemilu mendatang" memperoleh nilai tertinggi (4,60), yang mengindikasikan bahwa kegiatan PkM berhasil membangkitkan motivasi intrinsik peserta untuk lebih aktif dalam proses demokrasi. Sementara itu, aspek "Kemampuan mengenali praktik kecurangan pemilu" memperoleh nilai terendah (4,32), namun tetap berada dalam kategori sangat baik. Temuan ini konsisten dengan penelitian Norris (2023) yang menegaskan bahwa pendidikan pemilu berbasis komunitas secara signifikan meningkatkan kesadaran politik dan kemauan berpartisipasi.

Analisis Hasil Kegiatan

Kegiatan PkM ini dapat dianalisis melalui tiga perspektif teori dalam ilmu administrasi publik. Pertama, dari perspektif teori partisipasi masyarakat (Arnstein, 1969), kegiatan ini berhasil membawa peserta dari level tokenism menuju genuine participation, di mana masyarakat tidak sekadar diberitahu (informing) melainkan secara aktif terlibat dalam deliberasi dan membangun pemahaman kolektif. Hal ini ditunjukkan oleh antusiasme peserta dalam sesi diskusi yang mendalam mengenai isu-isu kepemiluan di lingkungan mereka.

Kedua, dari perspektif good governance yang dikembangkan oleh UNDP (1997) dan dioperasionalkan dalam konteks Indonesia oleh Prasajo (2022), kegiatan ini memperkuat dua dimensi utama: (a) partisipasi (participation), melalui dorongan keterlibatan aktif warga dalam proses demokratis; dan (b) akuntabilitas (accountability), dengan membekali masyarakat pengetahuan tentang mekanisme pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu. Keduanya merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya pemerintahan yang baik di tingkat kelurahan (Dwiyanto, 2021).

Ketiga, dari perspektif pemberdayaan masyarakat (community empowerment) yang merujuk pada kerangka Freire (1970) dan Ife (2022), kegiatan ini telah memicu proses conscientization atau penyadaran kritis di mana masyarakat mulai mempertanyakan kondisi dan relasi kuasa yang selama ini membungkam keterlibatan politik mereka. Transformasi dari fatalism pasif menuju agency yang aktif ini merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan yang paling fundamental (Chambers, 2024). Temuan serupa dilaporkan oleh Subianto (2022) dalam studinya mengenai efektivitas penyuluhan hukum pemilu di daerah-daerah terpencil.

Keempat, dari perspektif administrasi publik kontemporer, kegiatan ini mendukung paradigma New Public Governance (Osborne, 2020) yang menekankan co-production antara pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan layanan publik, termasuk layanan demokrasi. Kolaborasi antara mahasiswa pascasarjana, aparatur kelurahan, dan masyarakat dalam kegiatan ini merefleksikan semangat co-production yang mendorong tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif (Bovaird & Loeffler, 2022).

Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi visual kegiatan PkM tersaji pada Gambar 1 hingga Gambar 4 di bawah ini, yang merekam seluruh rangkaian kegiatan dari pembukaan hingga sesi foto bersama sebagai penutup.



Gambar 4-5. Pelaksanaan Kegiatan

DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM

Dampak Jangka Pendek

Secara langsung, kegiatan PkM ini telah menghasilkan peningkatan yang terukur dalam pemahaman peserta mengenai pendidikan politik dan pengawasan pemilu. Nilai rata-rata evaluasi 4,45 dari skala 5,00 menjadi bukti kuantitatif keberhasilan program. Selain itu, aparatur kelurahan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran strategis mereka sebagai fasilitator pendidikan politik di tingkat paling dasar. Para peserta juga telah mendapatkan pengetahuan praktis tentang prosedur pelaporan pelanggaran pemilu yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Dampak psikologis berupa meningkatnya kepercayaan diri peserta untuk berpartisipasi dan mengawasi proses pemilu juga tercatat sebagai luaran penting dari kegiatan ini (Mietzner, 2020).

Dampak Jangka Menengah

Dalam jangka menengah (3–12 bulan), kegiatan ini diharapkan berkontribusi pada: (a) terbentuknya jaringan kader pengawas pemilu informal di tingkat kelurahan yang berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan; (b) meningkatnya angka partisipasi pemilih (voter turnout) pada pemilu-pemilu berikutnya di Kelurahan Dulomo Selatan; (c) berkurangnya toleransi masyarakat terhadap praktik money politics sebagai dampak dari meningkatnya literasi hukum ke pemilu; dan (d) penguatan peran pemerintah kelurahan sebagai agen pendidikan politik masyarakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa program pendidikan pemilih berbasis komunitas yang dilaksanakan secara konsisten mampu meningkatkan kualitas partisipasi politik secara substantif (Beetham, 2022; Cornwall, 2008).

Rencana Tindak Lanjut

Guna menjamin keberlanjutan program, beberapa rencana tindak lanjut telah dirumuskan bersama stakeholders: (1) penyusunan modul pendidikan politik berbasis konteks lokal yang dapat digunakan secara mandiri oleh aparatur kelurahan; (2) pembentukan forum diskusi warga (citizen forum) yang secara rutin membahas isu-isu ke pemilu dan tata kelola pemerintahan kelurahan; (3) rencana kegiatan PkM lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, mencakup kelurahan-kelurahan tetangga; (4) pengembangan materi edukasi berbasis digital yang dapat disebarluaskan melalui media sosial; serta (5) sinkronisasi program dengan agenda resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kota Gorontalo (Prasojo, 2022).

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Bina Taruna Gorontalo di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur kelurahan mengenai pendidikan politik dan

pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum, yang tercermin dalam nilai rata-rata evaluasi sebesar 4,45 dari skala 5,00.

Dari perspektif ilmu administrasi publik, kegiatan ini membuktikan relevansi dan efektivitas pendekatan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dalam memperkuat fondasi good governance di tingkat pemerintahan terbawah. Integrasi konsep partisipasi masyarakat (Arnstein, 1969), good governance (UNDP, 1997; Prasajo, 2022), dan pemberdayaan (Freire, 1970; Ife, 2022) dalam desain kegiatan terbukti mampu menghasilkan luaran yang bermakna bagi peningkatan kapasitas demokratis masyarakat.

Kegiatan ini menegaskan bahwa institusi pendidikan tinggi, khususnya program pascasarjana, memiliki tanggung jawab dan kapasitas strategis untuk berkontribusi dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal. Diperlukan kesinambungan program dan dukungan kelembagaan yang lebih kuat dari berbagai pemangku kepentingan agar dampak yang telah dicapai dapat dipertahankan dan diperluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Beetham, D. (2022). *Democratic audit: Elections, parties, and citizens' political capacities* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Bovaird, T., & Loeffler, E. (2022). Co-production of public services and outcomes. In T. Bovaird & E. Loeffler (Eds.), *Public management and governance* (4th ed., pp. 239–255). Routledge.
- Chambers, R. (2024). *Rural development: Putting the last first* (Revised ed.). Intermediate Technology Publications.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking participation: Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia* (Edisi ke-5). Gadjah Mada University Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed* (M. B. Ramos, Trans.). Herder and Herder.
- Gaventa, J. (2021). Participation and citizenship: Exploring power for change. *IDS Bulletin*, 52(1), 65–82. <https://doi.org/10.19088/1968-2021.117>
- Ife, J. (2022). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Laporan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024: Evaluasi dan rekomendasi*. KPU Republik Indonesia.
- Mietzner, M. (2020). Indonesia's democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*, 27(8), 1443–1461. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796844>

- Norris, P. (2023). *Electoral integrity in the modern world: Comparative perspectives*. Cambridge University Press.
- Osborne, S. P. (2020). *Public service logic: Creating value for public service users, citizens, and society through public service delivery*. Routledge.
- Prasojo, E. (2022). *Administrasi publik: Transformasi pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Santoso, P., & Purwaningsih, T. (2021). Partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi lokal: Studi di kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 101–118. <https://doi.org/10.22146/jsp.63210>
- Subianto, A. (2022). Efektivitas penyuluhan hukum kepemiluan berbasis komunitas dalam meningkatkan literasi politik masyarakat pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 45–62. <https://doi.org/10.21776/ub.jap.2022.019.01.04>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. United Nations Development Programme.
- Warsilah, H., & Sugiyanto. (2023). Pengawasan partisipatif dalam pemilu: Strategi pemberdayaan masyarakat sipil. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 16(1), 77–94. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v16i1.15278>